

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . CV. Syakir Media Press.
- Andespa, R. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Pekanbaru: Alaf Riau
- Anwar, Y., & Adang. (2008). Pengantar Sosiologi Hukum. PT Grasindo Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. Setara Press. Asri.Australia:*Lawbook*
- Biro Hukum dan Humas Badan POM RI, Siaran Pers Badan POM: Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat, <http://quovadis-indonesia.blogspot.com/> (diakses 20 Agustus 2023)
- Fakhrudin, I. (2015). Kekurangan dan kelebihan obat
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haerandi, M. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal. Jurnal Universitas Islam Negri Makasar, 2 (1), 9.
- Herbal.<http://www.manfaatcaramengatasi.com/2015/10/kekurangan-dankelebihan-obat-herbal.htm> (diakses 1 Juli 2023)
- Hermanto, N., & Subroto, M. (2007). Pil Jamu dan Herbal tanpa Efek Samping. PTElex Media Komputindo. Januari 2024)
- Kelsen, H. (2016). Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri; alih bahasa, H. Somardi. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Kelsen, H. (2018). Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. penerjemah, Raisul Muttaqien. Bandung : Nusa Media.
- Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan 1 Tahun 2024
- Kompas.com, U. (2008). Alami Belum Tentu Aman. <http://www.smallcrab.com/kesehatan/339-alami-belum-tentu-aman> (diakses 20 Agustus 2023)
- Laritmas. S., & Rosidi, A. (2024) Teori-Teori Hukum Perspektif Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang.
- Latif, Y. (2015). Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dariPancasila. Gramedia pustaka Utama.
- Leiboff, M., & Thomas, M. (2009). *Legal Theory: Context and Practices*.
- Liar.<https://www.suarantb.com/2019/09/25/empat-warga-dompu-jadi-korban-kapsul-tawon-liar/> (Diakses 3 April 2024)
- Miranda. (2021). Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu yang

- Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan). Universitas Medan Area.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram *University Press*.
- Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Murhaini, S. (2020). Sosiologi Hukum. LaksBang Justitia Griya Purwa
- Muhayat, M. Y. (2012). Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Lebih dari 2,75 Milyar Rupiah. <https://www.pom.go.id/berita/balai-besar-pom-di-medanmusnahkan- obat-dan-makanan-ilegal-lebih-dari--2,75-milyar-rupiah> (diakses 23 Mei 2024)
- Nugroho, S. A. (2015). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala dan Implementasinya. Jakarta: Prenadamedia.
- Peran BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. <https://jdih.pom.go.id> (diakses 1 juli 2023)
- Profil BPOM. (2022). <https://www.pom.go.id/profil> (diakses 1 Februari 2024)
- Biro Hukum dan Humas Badan POM. (2015). Balai Besar POM di Medan *Publishing*.
- Rahmadania, S. R. (2023). Wanita di Bandung Kena Gagal Ginjal Usia 22,Bisa Dipicu Konsumsi Obat Diet?. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d- 6955257/wanita-di- bandung-kena-gagal-ginjal-usia-22-bisa-dipicu- konsumsi-obat-diet> (diakses 12 Januari 2024)
- Rahmadhani, A. P. (2022). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor Pom. Universitas Sriwijaya.
- Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 – 2024. RinekaCipta.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (1), 3.
- Sarwono, J. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Suluh Media.
- Setyawan, F. R. & Sudarsono, Y. (2021). Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum *Inconsistency of the Concept of Legal Protection of Traditional Cultural Expressions with Theory of Legal Ideals*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 13(1), 126–139.
- Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
- Siagian, S.P. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta:PT

- Sidabalok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.Sinar Baru Algenso.
- Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali pers.
- Sudikno. (2016). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, Sudjana, N., & Ibrahim. (2001). Penelitian dan Penilaian Pendidikan.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Sumarto, H. (2003). Inovasi, Partisipasi, dan *Good Governance*.
- Suryabata, S. (2003). Metodologi Penelitian. Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Syarif, S., & Yunus, F. M. (2013). Metode Penelitian Sosial. Ushuluddin
- TMochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah,Teori,Asas dan Filsafat Hukum. Yogyakarta : *Red & White Publishing*.
- Umami, A. M, dkk.(2023). Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat- Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Jurnal Risalah Kenotariatan 4 (1).
- Umanailo, M. C. B. (2016). Sosiologi Hukum. *Fam Publishing*.
- Zuhairi, A. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya, Jakarta: *GH Publishing*.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yayasan Obor Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367
- Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obaat dan Makanan
- Permenkes RI Nomor 246/MenKes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional